

Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut, di antaranya sebagai berikut.

A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tentara RI dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali Kota Madiun pada tanggal 30 September 1948. Musso pun tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur.

B. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Dipimpin Sekarmaji Marjan Kartosuwiryo, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.

C. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950, dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usahanya dapat digagalkan.

D. Andi Aziz

Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Ia adalah mantan perwira KNIL. Andi Aziz memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT (Negara Indonesia Timur). Ia sangat menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Selain itu, ia menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri. Pada 8 April 1950, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke

Jakarta dalam 2 x 24 jam. Namun, setelah batas ultimatum yang dikeluarkan agar Andi Aziz ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya lewat, Andi Aziz tidak datang juga ke Jakarta. Oleh karena itu, pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz. Seluruh pasukan ekspedisi berhasil mendarat pada 26 April 1950. Pada bulan yang sama pula, Andi Aziz menyerahkan diri, tetapi pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus 1950.

E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. Bertujuan membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950.

F. Perubahan Bentuk Negara Indonesia

Yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari Konferensi Meja Bundar 2 November 1949. Adapun dalam negara serikat, wilayah Indonesia dibagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, dengan besar wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara-negara bagian tersebut antara lain Republik Indonesia (dengan luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak), Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Selatan. Adapun presiden untuk Republik Indonesia Serikat adalah Presiden Soekarno dan perdana menterinya adalah Moh. Hatta. Konstitusi yang dipakai adalah Konstitusi RIS.

Sejak awal tahun 1950, dorongan rakyat agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia makin menguat. Pemerintah negara-negara bagian dan RIS kemudian bergabung untuk merancang UUD baru dengan konsep negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Presiden RIS, Soekarno, mengumumkan Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan. Selain itu, di waktu yang sama, Soekarno menandatangani UUDS yang dikenal dengan UUDS 1950. Adapun UUDS 1950 mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Masa 1950-1959

Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDs 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan. UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, sama seperti RIS. Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan perdana menteri bersama para menteri. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berbagai

kabinet terbentuk dan jatuh silih berganti. Pada masa itu, terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu 1955 juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga Konstituante sejumlah 550 orang. Lembaga Konstituante mulai bekerja sejak tahun 1956. Tugas lembaga ini adalah menyusun konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Namun, hingga tahun 1959, tugasnya belum juga terselesaikan. Terjadi perdebatan terus-menerus antaranggota konstituante. Kegagalan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru dikhawatirkan akan membawa perpecahan bangsa. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang intinya memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945 dan membubarkan Konstituante. Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan yang terjadi antara lain sebagai berikut :

A. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh

Pada April 1950, Ibnu Hajar dan pasukannya melakukan pengacauan di Kalimantan Selatan dan menyatakan bergabung dengan DI/TII. Sementara itu, pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Kahar Muzakkar. Pada Agustus 1953, Abdul Kahar Muzakkar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Adapun DI/TII di Aceh dipimpin Daud Beureueh. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Beureueh menyatakan Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah segera mengirim pasukan untuk tumpas berbagai pemberontakan tersebut. Dalam beberapa pemberontakan tersebut, dilakukan jalur perundingan dan jalur militer. Berkat dukungan rakyat, akhirnya, pemberontakan pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan.

B. Pemberontakan PRRI

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) didirikan di Sumatra. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer.

C. Pemberontakan Permesta

Di Universitas Permesta, pada 17 Februari 1958, diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cendekiawan, dan Mayor D Jus Somba. Saat pertemuan tersebut, terlontarlah pernyataan dari Mayor D. Jus Somba bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutuhnya. Dengan demikian, sejak 17 Februari 1958, Permesta memutuskan hubungan dengan pemerintah RI. Pemerintah segera melakukan operasi militer yang terbagi dalam beberapa tahap untuk menumpas pemberontakan ini.

Untuk mempermudah memahami materi, silahkan perhatikan video berikut.



SOAL

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat !

1. Pada masa awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 September 1948 di Madiun terjadi pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia pimpinan Muso, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham...
A. Liberal
B. Islam
C. Sosialis
D. Komunis
2. Tujuan pemberontakan yang dilakukan oleh Dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo adalah
A. membentuk negara sendiri
B. mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam
C. hanya pasukan pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT
D. mengganti Pancasila dengan paham komunis
3. Berdasarkan UUDS 1950, tugas seorang presiden adalah
A. sebagai kepala negara
B. sebagai kepala pemerintahan
C. sebagai menanggung jawab pemerintahan dan pembuat kebijakan
D. sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah

Tariklah garis sesuai dengan jawaban yang tepat !

- | | |
|--|------------|
| 4. Pemimpin gerakan APRA di Bandung | Andi Aziz |
| 5. Pemimpin pemberontakan RMS | Westerling |
| 6. Pemberontakan yang bertujuan hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT | Soumokil |

Pilihlah jawaban yang tepat pada kotak yang disediakan !

7. Berlakunya UUDS menggantikan UUD 1945
8. Permesta memutuskan hubungan dengan pemerintah RI
9. Pemimpin DI/TII di Aceh
10. Yang memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia